



Sejumlah prajurit bregada Lombok Abang mengikuti upacara pergantian prajurit jaga di Kadipaten Pura Pakualaman, Sabtu (22/6). Tradisi pergantian prajurit jaga di Pura Pakualaman yakni prajurit bregada Lombok Abang dan prajurit Plangkir yang berganti jaga setiap 35 hari menurut kalender Jawa.

► KESEJAHTERAAN RAKYAT

## Abdi Dalem Diusulkan Peroleh BPJS

**UMBULHARJO**—Komisi D DPRD Kota Jogja menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait dengan Raperda Ketenagakerjaan pada 13 Juni lalu. Salah satu yang disoroti yakni pemberian BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan bagi abdi dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pura Pakualaman.

Alli Alinisa Karis  
[all@harianjogja.com](mailto:all@harianjogja.com)

Wakil Ketua Pansus Raperda Ketenagakerjaan DPRD Kota Jogja, Krisnadi Setyawan, menuturkan sebisa mungkin undang-undang ketenagakerjaan bisa mengakomodasi muatan lokal. Menurutnya, abdi dalem punya peranan penting dalam menjaga kelestarian budaya di Yogyakarta.

Di satu sisi, sebanyak 60 abdi dalem Kadipaten Pura Pakualaman telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun, ini belum mengcover semuanya, termasuk abdi dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Padahal, ada risiko pekerjaan yang mereka hadapi. Maka, menurut Krisnadi, sudah sepantasnya abdi dalem mendapatkan jaminan ketenagakerjaan.

► Usulan pemberian BPJS Ketenagakerjaan untuk abdi dalem bukan dalam konteks kesejahteraan, namun lebih ke konteks perlindungan.

► Sangat memungkinkan pembayaran premi BPJS dibayarkan menggunakan danais.

"Kalau abdi dalem bukan dalam konteks kesejahteraan, lebih pada pengabdian budaya. Tapi kalau saya melihatnya ini lebih konteks perlindungan. Bagaimanapun mereka mengabdikan diri untuk kebudayaan yang adituhung itu harus dilindungi. Misalnya, abdi dalem yang melihara kuda. Kalau sampai ada kecelakaan kerja ditendang kuda, harus ada jaminan kecelakaan kerjanya seperti apa," kata Krisnadi saat dikonfirmasi, Minggu (23/6).

Dia menambahkan, Kraton Ngayogyakarta hadiningrat dan Pura Pakualaman sudah menjadi bagian badan hukum warisan budaya. Menurutnya, Komisi D yang bermitra dengan Dinas Kebudayaan punya kewajiban untuk mengaturnya. Namun, Krisnadi memastikan ke depan akan dibahas yang lebih mendalam.

"Kraton kaget karena disamakan dengan perusahaan. Namun, ini konteksnya perlindungan. Bagaimanapun juga, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman merupakan pemberi kerja dan pemberi upah. Untuk itu harus ada *sharing* dengan abdi dalem. Mungkin dengan upahnya yang sedikit, persentasenya

disesuaikan agar bisa membayar BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan," katanya.

Bagi politikus Gerindra ini, sangat memungkinkan pembayaran premi BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan dibayarkan menggunakan danais, sebagaimana upah abdi dalem yang selama ini bersumber dari danais. Namun, tentu perlu adanya pengaturan. "Sangat memungkinkan menggunakan danais, tinggal manajemen Kraton yang lebih pintar mengatur," katanya.

Salah satu abdi dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Purwilo, menyambut baik usulan itu. Jika nantinya benar-benar terealisasi, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan setidaknya membuatnya sedikit merasa tenang saat bertugas.

Abdi dalem yang bertugas sebagai prajurit ini mengaku, selama ini tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. Hanya saja, jika ada kecelakaan atau musibah, Kraton tetap memberikan santunan. "Misalnya dalam tugasnya abdi dalem mengalami kecelakaan, Kraton tetap membantu untuk perawatan dan berobat. Kraton tetap mengucurkan dana," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005